

Peran Kepemimpinan Informal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Kampung Matara, Kabupaten Merauke

Frederikus Antonius Mana*; Syahrabudin Husein Enala

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

* Correspondence : manafrederick87@unmus.ac.id

ABSTRAK

Kepemimpinan informal dalam kehidupan masyarakat kampung tetap memiliki pengaruh penting meskipun penyelenggaraan pemerintahan telah dijalankan melalui struktur kepemimpinan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara legitimasi sosial yang dimiliki pemimpin informal dan kewenangan administratif pemerintah kampung yang dapat memengaruhi proses tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kepemimpinan informal dan perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Kampung Matara, Kabupaten Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan informan secara purposif yang melibatkan unsur pemerintah kampung, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan informal memiliki peran dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kampung, menyampaikan aspirasi masyarakat, membantu penyelesaian persoalan sosial, mendorong partisipasi masyarakat, serta mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintahan kampung. Hubungan antara pemimpin informal dan pemerintah kampung menunjukkan pola kerja sama yang saling melengkapi sesuai dengan kedudukan dan ruang peran masing-masing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan informal merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan Kampung Matara karena mampu memperkuat partisipasi, komunikasi, dan hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci : *Kepemimpinan Informal; Pemerintahan kampung; Peran; Tata kelola*

ABSTRACT

Informal leadership continues to exert significant influence in village community life, despite the formalization of governance through established leadership structures. This condition indicates an interaction between the social legitimacy held by informal leaders and the administrative authority of the village government, which may influence governance processes. This study aims to analyze the forms of informal leadership and their roles in supporting governance in Matara Village, Merauke Regency. The study employed a qualitative descriptive approach, with informants selected purposively from village government officials, youth leaders, community leaders, and local residents. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation and subsequently analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that informal leadership plays an important role in bridging communication between the community and the village government, conveying community aspirations, facilitating the resolution of social issues, encouraging community participation, and supporting decision-making processes and the implementation of village government programs. The relationship between informal leaders and the village government demonstrates a complementary pattern of collaboration based on their respective positions and spheres of responsibility. This study concludes that informal leadership constitutes an

important component of governance in Matara Village, as it strengthens participation, communication, and collaborative relations between the government and the community.

Keywords: *Informal Leadership; Village Government; Role; Governance*

Pendahuluan

Pemerintahan kampung merupakan institusi pemerintahan yang berhadapan secara langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat pada tingkat lokal. Penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administratif, pelayanan publik, dan pembangunan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah mengelola hubungan antarpemangku kepentingan, mengakomodasi aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang dalam komunitas. Perspektif tata kelola (governance) karena itu menempatkan pemerintahan bukan semata-mata sebagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi formal, tetapi sebagai proses interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor yang memiliki sumber daya maupun pengaruh dalam pengelolaan kepentingan bersama. Dalam konteks pemerintahan desa atau kampung, pola kolaborasi tersebut semakin penting karena otonomi lokal membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan (Astuti & Suaedi, 2021)

Keterlibatan berbagai aktor dalam tata kelola pemerintahan menjadi semakin kompleks pada masyarakat yang memiliki struktur sosial, adat, agama, dan hubungan komunal yang kuat. Di luar struktur pemerintahan formal, terdapat individu atau kelompok tertentu yang memperoleh pengakuan dan kepercayaan masyarakat berdasarkan kedudukan sosial, adat, agama, pengalaman, pengetahuan lokal, integritas, maupun kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat (Kambu, 2022). Aktor tersebut dapat memiliki pengaruh terhadap sikap dan tindakan masyarakat meskipun tidak selalu menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan formal bukan satu-satunya sumber pengaruh dalam tata kelola lokal; legitimasi sosial yang melekat pada pemimpin informal juga dapat membentuk proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Kepemimpinan informal dalam penelitian ini dipahami sebagai kepemimpinan yang pengaruhnya terutama terbentuk melalui pengakuan sosial dan penerimaan masyarakat, bukan semata-mata melalui pengangkatan administratif. Berbeda dengan pemimpin formal yang memperoleh kewenangan berdasarkan jabatan dan aturan kelembagaan, pemimpin informal memperoleh legitimasi melalui hubungan sosial dan kemampuan memengaruhi komunitas (Islamy & Andriani, 2022). Dalam masyarakat kampung, kepemimpinan semacam ini dapat ditemukan pada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, atau figur lain yang secara empiris menjadi rujukan masyarakat. Namun, kategori tersebut tidak dapat ditetapkan secara apriori karena bentuk kepemimpinan informal sangat bergantung pada konfigurasi sosial dan budaya masing-masing komunitas.

Keberadaan kepemimpinan informal memiliki relevansi penting dalam perspektif tata kelola pemerintahan kampung karena proses pemerintahan tidak berlangsung dalam ruang sosial yang terpisah dari masyarakat. Pemimpin informal dapat menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi, membantu

menyelesaikan konflik, mendorong keterlibatan masyarakat, serta memberikan dukungan sosial terhadap pelaksanaan program pemerintahan (Yudanto et al., 2024). Studi mengenai tata kelola desa menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat lokal semakin membutuhkan pola kolaborasi yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Astuti dan Suaedi (2021), misalnya, menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat, dan aktor lainnya menjadi bagian penting dalam penguatan kemandirian desa.

Perkembangan studi tata kelola kontemporer juga menunjukkan bahwa keterlibatan banyak aktor tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif. Kolaborasi membutuhkan adanya interaksi, kepercayaan, pemahaman bersama, kapasitas untuk bertindak, serta pembagian peran yang dapat diterima oleh para pihak. Studi terbaru mengenai tata kelola desa menemukan bahwa perbedaan perspektif antaraktor dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dapat menghambat terbentuknya motivasi bersama dan kapasitas tindakan kolektif (Dwi Anggraini & Aji Imawan, 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tata kelola bukan sekadar ada atau tidaknya keterlibatan aktor, tetapi bagaimana hubungan antaraktor tersebut dibangun dan bagaimana masing-masing menggunakan kewenangan maupun pengaruhnya.

Perspektif tersebut penting ketika diterapkan pada hubungan antara kepemimpinan formal dan informal. Pemerintah kampung memiliki kewenangan administratif berdasarkan struktur dan regulasi pemerintahan, sedangkan pemimpin informal memiliki pengaruh yang terutama bersumber dari legitimasi sosial masyarakat (Santoso et al., 2026). Kedua sumber otoritas tersebut dapat saling melengkapi apabila terdapat komunikasi, pengakuan terhadap peran masing-masing, dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Sebaliknya, hubungan tersebut dapat menjadi problematis apabila terjadi tumpang tindih peran, dominasi aktor tertentu, ketidakjelasan kewenangan, atau lemahnya koordinasi. Dengan demikian, hubungan formal-informal perlu dipahami sebagai proses yang dinamis dan tidak dapat diasumsikan sejak awal selalu harmonis.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) untuk memahami keterlibatan kepemimpinan informal dalam pemerintahan kampung. Pendekatan ini memandang tata kelola sebagai proses yang membutuhkan interaksi berbagai aktor dengan sumber kewenangan, kepentingan, pengetahuan, dan kapasitas yang berbeda. Studi-studi mutakhir pada tingkat desa memperlihatkan bahwa kolaborasi lintas aktor dapat memperkuat pengelolaan kepentingan publik apabila didukung oleh komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan kapasitas tindakan kolektif. Penelitian mengenai pengelolaan desa berbasis kolaborasi juga menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah, komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan aktor pendukung lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program (Nasyaya et al., 2026).

Kajian terbaru bahkan mulai mengembangkan pendekatan yang menggabungkan *hybrid governance* dan *collaborative governance* dalam pembangunan desa di Indonesia. Perspektif tersebut berangkat dari adanya ketegangan antara mekanisme pemerintahan formal yang bersifat regulatif dan kebutuhan untuk mengakomodasi partisipasi serta kondisi lokal (Muarib et al., 2026). Temuan penelitian pada beberapa desa di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi mekanisme formal dengan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan fleksibilitas, responsivitas, dan kesesuaian kebijakan dengan konteks lokal, sementara

kolaborasi antaraktor dapat mengurangi fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Perspektif ini relevan bagi penelitian kepemimpinan informal karena menunjukkan bahwa tata kelola kampung pada praktiknya dapat dibentuk oleh interaksi antara struktur formal dan mekanisme sosial yang berkembang di luar struktur birokrasi (Jainuri et al., 2020).

Dalam konteks Papua, interaksi tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena struktur pemerintahan formal hidup berdampingan dengan sistem sosial dan kepemimpinan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat. Kepemimpinan informal dapat memperoleh legitimasi melalui adat, agama, hubungan kekerabatan, senioritas, pengalaman, maupun kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menciptakan kemungkinan adanya dua sumber pengaruh dalam kehidupan kampung, yaitu otoritas formal-administratif yang dimiliki pemerintah kampung dan legitimasi sosial-kultural yang dimiliki pemimpin informal. Keduanya dapat berinteraksi dalam pengambilan keputusan, penyelesaian persoalan masyarakat, mobilisasi partisipasi, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Penelitian terdahulu mengenai kepemimpinan informal di Kampung Waena, Kota Jayapura, memberikan gambaran bahwa pemimpin informal dapat memainkan peran nyata dalam kehidupan pemerintahan kampung. Penelitian tersebut menemukan keberadaan pemimpin adat, pemimpin agama, dan tokoh pemuda yang menjadi tempat konsultasi masyarakat ketika menghadapi persoalan serta menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan antara struktur kepemimpinan informal dan formal, termasuk kondisi ketika seorang pemimpin adat sekaligus menempati posisi dalam struktur formal pemerintahan kampung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa batas antara otoritas formal dan informal pada tingkat kampung dapat bersifat dinamis dan saling beririsan (Aedah et al., 2017).

Meskipun penelitian terdahulu telah menjelaskan keberadaan, peran, dan fungsi kepemimpinan informal dalam sistem pemerintahan kampung, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Sebagian kajian kepemimpinan informal cenderung berfokus pada identifikasi tokoh dan fungsi sosialnya, sedangkan studi collaborative governance pada tingkat desa lebih banyak menempatkan pemerintah, lembaga desa, sektor swasta, organisasi masyarakat, atau kelompok kepentingan sebagai aktor kolaborasi. Kajian mengenai tata kelola desa kontemporer sendiri menunjukkan bahwa model kolaborasi pada tingkat desa masih memerlukan pengembangan yang lebih kontekstual karena karakteristik pemerintahan desa berbeda dari tata kelola pada tingkat pemerintahan yang lebih luas. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan untuk menjelaskan secara lebih spesifik bagaimana pemimpin informal sebagai aktor yang memiliki legitimasi sosial berkontribusi terhadap proses tata kelola pemerintahan kampung.

Kampung Matara, Kabupaten Merauke, menjadi konteks empiris penelitian ini. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, pemerintah formal berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat yang di dalamnya terdapat figur-figur yang memperoleh kepercayaan dan pengaruh sosial. Interaksi tersebut berpotensi memengaruhi bagaimana aspirasi masyarakat disampaikan, bagaimana persoalan sosial diselesaikan, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta bagaimana kebijakan dan program pemerintah memperoleh penerimaan masyarakat. Namun, belum terdapat penjelasan empiris yang memadai mengenai siapa yang memperoleh legitimasi sebagai pemimpin informal di Kampung Matara, bagaimana pengaruh tersebut dijalankan, dan bagaimana perannya berinteraksi dengan kewenangan pemerintah kampung.

Atas dasar persoalan tersebut, unit analisis penelitian ini adalah peran kepemimpinan informal dalam proses tata kelola pemerintahan Kampung Matara. Analisis diarahkan bukan hanya pada identifikasi individu atau kelompok yang dianggap sebagai pemimpin informal, tetapi pada tindakan dan hubungan yang menunjukkan bagaimana legitimasi sosial mereka digunakan dalam proses pemerintahan. Peran tersebut ditelusuri melalui keterlibatan dalam komunikasi pemerintah–masyarakat, penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, mobilisasi partisipasi masyarakat, serta dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintahan kampung. Hubungan antara pemimpin informal dan pemerintah formal juga dianalisis untuk mengetahui apakah pola yang terbentuk bersifat kolaboratif, komplementer, negosiatif, atau justru menunjukkan tumpang tindih kewenangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian administrasi publik dan pemerintahan lokal dengan menghubungkan dua ruang kajian yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah, yaitu kepemimpinan informal dan tata kelola pemerintahan kampung. Kebaruan penelitian tidak terletak sekadar pada perpindahan lokus penelitian ke Kampung Matara, tetapi pada perubahan fokus analisis dari identifikasi “peran dan fungsi” pemimpin informal menuju analisis mengenai bagaimana legitimasi sosial diterjemahkan menjadi kapasitas tata kelola. Dengan perspektif tersebut, kepemimpinan informal ditempatkan sebagai salah satu aktor dalam konfigurasi tata kelola lokal yang dapat memengaruhi partisipasi, komunikasi, mediasi kepentingan, pengambilan keputusan, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pendekatan ini juga memperluas kajian tata kelola desa yang selama ini lebih banyak menempatkan kolaborasi dalam hubungan antarlembaga formal dan organisasi pemangku kepentingan.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada hubungan antara tiga unsur utama, yaitu legitimasi kepemimpinan informal, peran dalam proses pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan kampung. Legitimasi sosial menjelaskan dasar penerimaan dan pengaruh seorang pemimpin informal; peran menunjukkan bagaimana pengaruh tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata; sedangkan perspektif tata kelola digunakan untuk memahami kontribusi tindakan tersebut terhadap hubungan pemerintah–masyarakat, partisipasi, koordinasi, penyelesaian persoalan, dan proses pengambilan keputusan. Kerangka ini tidak mengasumsikan bahwa kepemimpinan informal selalu memberikan dampak positif, tetapi membuka ruang untuk menemukan secara empiris apakah pengaruh tersebut mendukung, melengkapi, atau bahkan berpotensi menghambat tata kelola pemerintahan kampung. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan informal dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Kampung Matara, Kabupaten Merauke. Penelitian diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana kepemimpinan informal dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Kampung Matara, Kabupaten Merauke? dan (2) bagaimana peran kepemimpinan informal dalam mendukung tata kelola pemerintahan Kampung Matara, Kabupaten Merauke? Melalui kedua pertanyaan tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman mengenai konfigurasi kepemimpinan informal, sumber legitimasinya, bentuk kontribusinya dalam proses pemerintahan, serta pola hubungan antara pemimpin informal dan pemerintah formal dalam tata kelola pemerintahan kampung.

Metode

Penelitian ini membahas Peran Kepemimpinan Informal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Kampung Matara, Kabupaten Merauke. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam mengenai praktik dan peran kepemimpinan informal dalam tata kelola pemerintahan kampung. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan informan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, artikel, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas aparat pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang mengetahui praktik kepemimpinan informal di Kampung Matara. Objek penelitian dibatasi pada bentuk kepemimpinan informal, perannya dalam tata kelola pemerintahan, serta hubungannya dengan pemerintah kampung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Desain ini disesuaikan dengan penelitian rujukan yang menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan informan secara purposif, wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan analisis data secara interaktif (Mulyana, 2018).

Hasil dan Pembahasan

1. Konfigurasi Kepemimpinan Informal di Kampung Matara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan di Kampung Matara tidak hanya berlangsung melalui struktur formal pemerintahan kampung, tetapi juga melibatkan figur-figur yang memperoleh pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah kampung dan masyarakat, keberadaan pemimpin informal masih memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh mereka tidak diperoleh melalui pengangkatan administratif, melainkan terbentuk melalui kedudukan sosial, kepercayaan masyarakat, pengalaman, pengetahuan lokal, serta kemampuan dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan kampung.

Kepemimpinan informal di Kampung Matara terutama dapat dilihat melalui keberadaan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta figur lain yang memiliki pengaruh dalam kelompok sosial tertentu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memberikan pengakuan kepada setiap tokoh. Tokoh adat memperoleh legitimasi terutama dari kedudukannya dalam struktur sosial dan pengetahuannya mengenai adat serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tokoh agama memperoleh kepercayaan melalui aktivitas keagamaan dan pembinaan kehidupan sosial, sedangkan tokoh masyarakat memperoleh pengaruh karena pengalaman, kemampuan berkomunikasi, serta keterlibatannya dalam berbagai persoalan masyarakat.

Tabel 1. Konfigurasi Kepemimpinan Informal di Kampung Matara

Aktor Kepemimpinan Informal	Sumber Legitimasi	Bentuk Pengaruh
Tokoh adat	Pengakuan adat dan masyarakat	Persoalan adat dan kehidupan sosial
Tokoh agama	Kepercayaan agama dan sosial	Pembinaan dan kehidupan kemasyarakatan
Tokoh masyarakat	Pengalaman dan kepercayaan masyarakat	Aspirasi, komunikasi, dan mediasi
Tokoh pemuda/kelompok sosial lainnya	Pengakuan kelompok	Partisipasi dan mobilisasi masyarakat

Sumber: Data Primer diolah Peneliti

Hasil wawancara lebih lanjut memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung melibatkan tokoh-tokoh tersebut ketika menghadapi persoalan yang tidak selalu dapat langsung diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan. Pada persoalan sosial dan adat, masyarakat lebih dahulu mencari pertimbangan dari figur yang dianggap memahami permasalahan dan memiliki kewibawaan untuk membantu mencari penyelesaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan informal masih memiliki ruang pengaruh yang nyata meskipun pemerintahan kampung telah memiliki struktur formal dengan kewenangan yang jelas.

Temuan ini memperlihatkan adanya dua sumber legitimasi kepemimpinan dalam kehidupan Kampung Matara. Pemerintah kampung memperoleh legitimasi formal melalui kedudukan dan kewenangan administratif, sedangkan pemimpin informal memperoleh legitimasi sosial melalui pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Perbedaan sumber legitimasi tersebut tidak selalu menghasilkan persaingan kewenangan, tetapi dapat membentuk hubungan yang saling melengkapi sesuai ruang peran masing-masing.

2. Peran Kepemimpinan Informal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan informal memiliki peran nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan Kampung Matara. Peran tersebut tidak dijalankan melalui kewenangan administratif sebagaimana pemerintah kampung, tetapi melalui kemampuan membangun komunikasi, menyampaikan aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi, membantu menyelesaikan persoalan sosial, dan memberikan pertimbangan terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

a. Menjembatani Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, pemimpin informal berperan sebagai salah satu penghubung antara masyarakat dan pemerintah kampung. Tidak semua masyarakat menyampaikan kebutuhan atau persoalan secara langsung kepada kepala kampung maupun aparat pemerintahan. Sebagian masyarakat lebih dahulu menyampaikan persoalan kepada tokoh yang dianggap dekat dan dipercaya. Tokoh tersebut kemudian membantu mengomunikasikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah kampung.

Peran tersebut berlangsung dalam dua arah. Pemimpin informal tidak hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga membantu menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Posisi ini menempatkan pemimpin informal sebagai jembatan sosial antara struktur pemerintahan dan komunitas serta memperkuat saluran komunikasi dalam tata kelola kampung.

b. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemimpin informal berperan dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan kampung. Pengaruh sosial yang dimiliki tokoh tertentu membantu pemerintah mengajak masyarakat mengikuti kegiatan pembangunan, kegiatan sosial, maupun kepentingan bersama lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dibentuk melalui instruksi administratif, tetapi juga melalui hubungan sosial dan kepercayaan.

Peran pemimpin informal menjadi lebih substantif ketika mereka tidak hanya memobilisasi masyarakat untuk mengikuti program pemerintah, tetapi juga membawa aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam proses perencanaan dan pembahasan kepentingan kampung. Dengan demikian, kepemimpinan informal dapat memperluas ruang representasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

c. Membantu Penyelesaian Persoalan Sosial

Peran lain yang menonjol adalah keterlibatan pemimpin informal dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada persoalan sosial dan adat, masyarakat sering melibatkan tokoh yang memiliki kewibawaan untuk memahami persoalan, memberikan pertimbangan, dan membantu mempertemukan pihak-pihak yang terlibat. Apabila persoalan membutuhkan tindakan administratif, penyelesaiannya kemudian melibatkan pemerintah kampung.

Pola tersebut menunjukkan bahwa mekanisme informal dan formal dapat digunakan secara berjenjang maupun bersamaan sesuai karakter persoalan. Pemimpin informal menjalankan fungsi mediasi sosial, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan administratif. Kombinasi keduanya memungkinkan penyelesaian persoalan dilakukan secara lebih kontekstual dan dapat diterima masyarakat.

d. Memberikan Pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin informal juga terlibat dalam pembahasan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pemerintah kampung pada kondisi tertentu mempertimbangkan pandangan tokoh yang memiliki pengaruh sosial,

terutama apabila keputusan berkaitan dengan kondisi masyarakat, persoalan sosial, atau kepentingan yang membutuhkan penerimaan bersama.

Keterlibatan tersebut berlangsung melalui komunikasi, konsultasi, dan forum pertemuan masyarakat. Pemimpin informal memberikan pandangan berdasarkan pengetahuan mengenai kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, sedangkan keputusan administratif tetap berada dalam kewenangan pemerintah kampung. Pola ini memperlihatkan adanya pembagian posisi antara pemberian pertimbangan sosial dan pengambilan keputusan formal.

3. Relasi Kepemimpinan Informal dan Pemerintah Formal dalam Tata Kelola Kampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin informal dan pemerintah Kampung Matara terbentuk melalui pembagian peran dan kerja sama sesuai ruang kewenangan masing-masing. Pemerintah kampung menjalankan fungsi administratif, pelayanan, pembangunan, dan kewenangan formal lainnya, sedangkan pemimpin informal lebih banyak bergerak pada ruang sosial melalui komunikasi, mediasi, penyampaian aspirasi, dan penggerakan masyarakat.

Berdasarkan pola interaksi yang ditemukan, hubungan antara kepemimpinan informal dan pemerintah formal dapat dipahami melalui tiga bentuk, yaitu konsultatif, komplementer, dan kolaboratif.

Tabel 2. Pola Relasi Kepemimpinan Formal dan Informal di Kampung Matara

Arena Tata Kelola	Pemerintah Kampung	Pemimpin Informal	Pola Relasi
Pengambilan keputusan	Memiliki kewenangan formal	Memberikan pertimbangan	Konsultatif
Aspirasi masyarakat	Menampung dan menindaklanjuti	Menjembatani aspirasi	Komplementer
Penyelesaian masalah	Fasilitasi dan kewenangan administratif	Mediasi dan pendekatan sosial	Kolaboratif
Partisipasi masyarakat	Merencanakan dan melaksanakan program	Mendorong keterlibatan masyarakat	Komplementer
Pelaksanaan kegiatan	Mengelola program dan sumber daya	Membangun dukungan sosial	Kolaboratif

Sumber: Data Primer diolah Peneliti

Pola konsultatif terlihat ketika pemerintah mempertimbangkan pandangan pemimpin informal dalam persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pola komplementer muncul ketika kedua aktor menjalankan peran yang berbeda tetapi saling melengkapi, sedangkan pola kolaboratif terlihat ketika keduanya terlibat bersama dalam penyelesaian persoalan maupun pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan dukungan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa posisi strategis pemimpin informal terletak pada kemampuannya mengisi ruang sosial yang tidak selalu dapat dijangkau melalui mekanisme birokrasi formal. Kedekatan dengan masyarakat, kepercayaan sosial, dan pemahaman terhadap kondisi lokal memberikan kapasitas kepada pemimpin informal untuk menjembatani logika administratif pemerintah dengan realitas sosial masyarakat.

Secara konseptual, hubungan tersebut bergerak dari legitimasi sosial yang menghasilkan pengaruh kepemimpinan informal, kemudian diwujudkan melalui komunikasi, representasi aspirasi, partisipasi, dan mediasi. Ketika kapasitas tersebut berinteraksi secara konstruktif dengan kewenangan formal pemerintah, terbentuk kapasitas kolaboratif yang mendukung tata kelola pemerintahan kampung.

**Legitimasi Sosial → Kepemimpinan Informal → Komunikasi, Aspirasi, Partisipasi, dan Mediasi
→ Kolaborasi Formal-Informal → Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung**

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi kepemimpinan informal terhadap tata kelola bukan berasal dari status tokoh itu sendiri, melainkan dari kemampuan mengubah legitimasi sosial menjadi kapasitas untuk memfasilitasi kepentingan bersama. Kepemimpinan informal dengan demikian dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan masyarakat dengan struktur formal pemerintahan.

Meskipun demikian, keberadaan kepemimpinan informal tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Pengaruh informal yang terlalu dominan dapat menimbulkan persoalan apabila hanya merepresentasikan kelompok tertentu atau memasuki ruang kewenangan administratif pemerintah. Karena itu, hubungan formal-informal membutuhkan batas peran yang jelas, keterbukaan, dan orientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan informal merupakan bagian penting dari konfigurasi tata kelola pemerintahan Kampung Matara. Kontribusinya terlihat melalui kemampuan menjembatani komunikasi pemerintah dan masyarakat, menyalurkan aspirasi, mendorong partisipasi, membantu penyelesaian persoalan, serta memberikan pertimbangan sosial dalam proses pemerintahan. Ketika kewenangan administratif dan legitimasi sosial berinteraksi secara proporsional dan kolaboratif, kepemimpinan informal dapat menjadi modal sosial yang memperkuat responsivitas, partisipasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan kampung.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan informal memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Kampung Matara, Kabupaten Merauke. Kepemimpinan informal memperoleh legitimasi melalui kepercayaan, pengakuan, pengalaman, dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Perannya terlihat dalam menjembatani komunikasi dan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah kampung, mendorong partisipasi masyarakat, membantu penyelesaian persoalan sosial, serta memberikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan kampung tidak hanya ditentukan oleh kewenangan administratif pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki aktor informal.

Hubungan antara pemimpin informal dan pemerintah kampung terbentuk melalui pola **konsultatif, komplementer, dan kolaboratif**. Pemerintah kampung tetap menjalankan kewenangan formal dan administratif, sedangkan pemimpin informal berperan terutama dalam ruang sosial dan kemasyarakatan. Interaksi keduanya memperlihatkan bahwa kepemimpinan informal bukan sebagai pengganti pemerintah formal, melainkan sebagai modal sosial yang dapat memperkuat komunikasi, partisipasi, penyelesaian masalah, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara **kewenangan administratif dan legitimasi sosial** menjadi unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan kampung yang responsif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Pemerintah Kampung Matara perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemimpin informal melalui pelibatan yang proporsional dalam musyawarah, penyelesaian persoalan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjaga batas kewenangan masing-masing. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian komparatif pada beberapa kampung di Papua Selatan untuk menganalisis variasi hubungan kepemimpinan formal dan informal serta kontribusinya terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan kampung.

Referensi

- Aedah, N., Kebijakan, M., Program, P., & Abstrak, P. U. (2017). Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3), 1–10.
- Astuti, S. J. W., & Suaedi, F. (2021). Building Independent Villages through Collaborative Governance by Village-Owned Enterprises (Best Practice from Panggunharjo Village, Central Java, Indonesia). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.37304/jispar.v7i2.962>
- Dwi Anggraini, A., & Aji Imawan, S. (2026). Analisis Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. *Journal of Management and Public Policy*, 15(2), 645–660. <https://doi.org/10.14710/jmpp.v15i2.56905>
- Islamy, L. O., & Andriani, R. (2022). Collaborative Governance Process of Village Fund

- Management. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1). <https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1678>
- Jainuri, Supriyono, B., Hakim, L., & Suryadi. (2020). Collaborative Governance in Transforming the Slum Area to Tourism Village in Malang, Indonesia. *Psychology and Education Journal*, 57(9).
- Kambu, A. (2022). Phenomenon Collaborative Management and Leadership in the Development of Traditional Village Kayu Batu City of Jayapura Indonesia. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 7(1). <https://doi.org/10.52062/keuda.v7i1.1956>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muarib, A. S., Supardal, & Abdillah, A. (2026). Collaborative Governance in Realizing an Inclusive Village for Persons with Disabilities in Sidorejo Village. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 11(2), 432–453. <https://doi.org/10.36982/jpp.v11i2.7103>
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasyaya, A., Lumban Tobing, A. C. I., & Siagian, S. I. O. (2026). Collaborative Governance in the Management of Ponot Waterfall Tourism Village. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 10(1), 57–67. <https://doi.org/10.19109/jssp.v10i1.36028>
- Santoso, B., Widodo, S. P., Bramuda, M. Y., & Wardiyanto, B. (2026). Collaborative Governance Analysis in the Implementation of the Smart Village Program in Banyuwangi Regency. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 12(1). <https://doi.org/10.29103/jsds.v12i1.25792>
- Yudanto, A. A., Solikin, A., & Windani, I. (2024). Collaborative Governance to achieve Village SDGs: A Case Study of Irrigation Systems in Krandegan Village. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 7(4). <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v7i4.345>